

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darumurti, Krishna Djaya. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Fuller, Lon L., 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven.
- Hadjon, Philipus M. et.al, *Hukum Administasi dan Good governance*, Jakarta: Penerbit universitas trisakti, 2010.
- Imanuel, Viktor. 2013. *Konsep Uji Materil*. Malang: Setara Pers.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Zainal Arifin, 2021, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nalle, Victor Imanuel W., *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.

Phillip Bobbit, 1984, *Constitutional Fate Theory of the Constitution*, Oxford
University Press, New York

Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XII. Jakarta: Rajawali Pers.

Safriani, Andi. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Makassar: Alauddin University
Press.

SF. Marbun dan Moh Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara*, Cetakan ke-6. Yogyakarta: Liberty.

Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Sinamo, Nomensen. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Permata Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas
Indonesia Press.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta:
Kanisius, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Peneltian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya
Bakti: Bandung.

Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta:
Deepublish.E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan
Kepastian Hukum*, akarta: KencanaRiduan Syahrani, 1999, *Rangkuman
Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Syahrani, Riduan. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Jurnal dan Tesis

Anggono, Bayu Dwi dan Nando Yussele Mardika, “Konsistensi Bentuk dan Materi

Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanganan Covid-

19”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 4, 2021.

Ansori, Lutfi,” Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Yuridis*, Vol 2, No 1, 1 Juni 2012.

Arasya Pradana A Azis, “Kekosongan Hukum Acara dan Krisis *Access to Justice*

dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah

di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 49, No. 1, 2019.

Ardiansyah, Mohammad Kamil, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung

Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal*

Ilmiah Kebijakan Hukum, vol. 14, No. 2, Juli 2020.

Eric dkk, “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan

(Beleidsregel)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2021.

Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”,

Administrative Law and Govemenrt Journal, Vol. 3, No. 1, Maret 2020.

Hasb, Ali Marwan, “Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol

14, No. 1.

Juhartini, 2012, “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pajak SE No.3/PJ/2011

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dan

Perbelakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Tesis*,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Jurhartini, Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pajak SE No.3/PJ/2011 tentang
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perbelakuan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Tesis* pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, tahun 2012.

Kristinah, Maria Magdalena dan Jumadi Purwatmodjo, “Analisis Surat Edaran
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Mario Julyano dan Aditya Sulistywan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal
Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

Marzuki, Laica, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*,
Vol. 8, No. 4, Agustus 2011.

Mutalib, Muhammad Thabrani, “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma
Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Indonesia”, *Tesis* Pada Progam
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Nasir, Gamar Abdul, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan
Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, September 2017.

Susanto, Sri Nur Hari, Larangan Ultra Vires (*Exces De Pouvoir*) dalam Tindakan
Pemerintahan Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon

Dan Sistem Hukum Kontinental), *Administrative Law & Governance*

Journal, Volume 3 Issue 2, June 2020

Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

8B Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18
Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7
Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Transportasi darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor SE 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang
Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju
Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Udara Dalam Masa
Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

Surat Edaran Nomor SE 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi

Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/413/2020.

Internet

Hardianto, "Transportasi Massal Penyumbang Terbesar Kasus Penyebaran Covid-19", <https://www.balipuspanews.com/transportasi-massal-penyumbang-terbesar-kasus-penyebaran-covid-19.html>

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/13363/2/Zidni%20Aghni%20Kiromi%20KEWENANGAN%20DISKRESI%20PEMERINTAH%20TERHADAP-2.pdf>,

diakses 25 Maret 2022

<http://repository.uin-suska.ac.id/8946/4/BAB%20III.pdf>, diakses 22 Maret 2022

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75142/ABINTORO%20PRAKOSO%20PENEMUAN%20HUKUM%20F.H%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 25 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adaptasi>, diakses 23 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/baru>, diakses 23 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebiasaan>, diakses 23 Maret 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/09150671/kerap-diucapkan-jokowi-frasa-new-normal-kini-direvisi-pemerintah?page=all>, diakses 23 Maret

2022;

lihat

juga

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/22413461/jubir-pemerintah->

[akui-diksi-new-normal-salah-ganti-dengan-adaptasi-kebiasaan](#), diakses 23

Maret 2022

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf, diakses 25 Maret 2020

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 26 Maret 2022

Press release yang dikeluarkan oleh School of Business & Management Institut Teknologi Bandung tentang Tantangan Moda transportasi Publik di Masa Pandemi (<https://www.sbm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Ini-Tantangan-Moda-Transportasi-Publik-di-Masa-Pandemi.pdf>)

Puskapsi FH UNEJ, 2020, 13 Mei, *WEBINAR: Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanggulangan COVID-19-W*. Riawan Tjandra Pengajar Hukum Administrasi Negara pada FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <https://www.youtube.com/watch?v=FiHB8iCp2ZE>

Stanly Ravel, “Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Transportasi yang Mana?”, <https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/06/080100715/ada-klaster-covid-19-di-transportasi-umum-transportasi-yang-mana->

Surat Edaran Kementerian Perhubungan

https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/timeline/Surat%20Edaran%20Menteri

